

ANALISIS KINERJA REALISASI ANGGARAN DALAM BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROBOLINGGO

Nur Hasanah¹⁾, Elok Dwi Vidiyastutik²⁾

Email: hasanah9611@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Panca Marga Probolinggo

Abstract

The research was conducted at the Regional Revenue, Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Probolinggo City with the aim of analyzing the performance of the budget realization in the regional expenditure of the Probolinggo City Government. the type of research used is quantitative descriptive, the data used from the 2013-2017 fiscal year. The results show the difference between the budget and the realization of spending has a significant difference when seen from the nominal, for growth growth is always changing or not, for harmony analysis for the last period shows improvement in realizing shopping spending, and for the calculation of shopping efficiency ratios of in 2013 to 2017 the City of Probolinggo Government has made savings which resulted in a SILPA surplus (Over Time Budget Calculation) which is good to use the following year.

Keywords: *Performance, Budgets Realization and Regional Expenditures*

PENDAHULUAN

Peraturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah, dalam rangka pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan (*value for money*).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efektif dan efisien. Mahmudi (2016: 154) Analisis Varians belanja mengetahui secara langsung besarnya selisih anggaran belanja dengan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya selama satu tahun. Dalam Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam seberapa jauh pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Analisis Keserasian Belanja untuk mengetahui keseimbangan antar

belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Dan rasio efisiensi belanja untuk mengukur tingkat penghematann anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) kota Probolinggo merupakan lembaga teknis daerah yang membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, salah satunya terkait tentang penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, keuangan dan perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013-2017**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013-2017?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran dalam belanja daerah pemerintah kota probolinggo tahun anggaran 2013-2017.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Arif (2009:05), Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi yang digunakan untuk organisasi nir laba yang memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan perusahaan atau sektor privat. Akuntansi sektor publik terdiri atas akuntansi pemerintahan, akuntansi rumah sakit, akuntansi lembaga pendidikan dan akuntansi organisasi nir laba lain yang didirikan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Halim (2012: 33), APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran.

Kinerja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Arif (2009:36) Laporan realisasi anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan serta perbandingan antara realisasi tersebut dan anggaran dalam satu periode pelaporan. Dengan demikian komponen dari laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja daerah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Analisis Belanja Daerah

Mahmudi (2016:154) menyatakan bahwa analisis belanja daerah sangat perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisiensi dan efektif (*value for money*). Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, dapat dibuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain berupa:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja anggaran. Analisis varians sangat sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja

memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa:

a. Analisis Belanja Operasi

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total belanja daerah. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga belanja operasi ini sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin dan berulang (*recurrent*).

b. Analisis Belanja Modal

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pengeluaran belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang, belanja modal juga bersifat rutin. Belanja modal akan mempengaruhi neraca pemerintah daerah, yaitu menambah aset daerah.

c. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Analisis proporsi belanja langsung dan tidak langsung bermanfaat untuk kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan pengendalian anggaran (*cost & budgetary*). Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas), sedangkan belanja tidak langsung adalah merupakan pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013-2017.

Sampel yang digunakan adalah Anggaran Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013-2017

Sumber Data dan Metode Pengumpulan

Data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan ketua bidang maupun karyawan di bagian akuntansi dan pelaporan.
2. Data sekunder diperoleh berupa data mengenai sejarah, struktur organisasi dan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran) Pemerintah Kota Probolinggo dari tahun 2013-2017.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi) dan Studi Pustaka.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians Belanja = Realisasi – Anggaran

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Th } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Th } t - \text{Realisasi Belanja Th } t-1}{\text{Realisasi Belanja Th } t-1}$$

3. Analisis Keserasian Belanja

- a. Analisis Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- b. Analisis belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal thd Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- c. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

$$\text{Rasio Belanja Langsung thd Total Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Tidak langsung thd TB} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Sharon (2013) dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
- Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data yang telah didapat, sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai Analisis Kinerja Realisasi Anggaran pada Belanja Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2013-2017, dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan teori dari literatur kemudian menarik kesimpulan dari apa yang telah didapat dari penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN

Data Penelitian

1. Analisis Varians Belanja

Tabel 6. Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%	Kinerja
2013	732.492.777.762,65	655.932.038.459,43	(76.560.739.303,22)	10,45	Kurang Baik
2014	907.766.807.435,83	778.254.103.607,97	(129.512.703.827,86)	14,27	Kurang Baik
2015	904.576.722.490,62	731.680.260.276,83	(172.896.462.213,79)	19,11	Kurang Baik
2016	1.129.160.190.770,55	911.768.784.364,92	(217.391.406.405,63)	19,25	Kurang Baik
2017	1.166.661.552.002,30	957.598.284.549,55	(209.063.267.452,75)	17,92	Kurang Baik

Sumber: Data BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2013-2017, yang diolah 2018

Analisis varians belanja dari tahun 2013-2017 menunjukkan selisih anggaran dengan realisasi yang bersaldo negatif yaitu untuk tahun 2013

sebesar Rp 76.560.739.303,22 atau 10,45%, untuk tahun 2014 sebesar Rp 129.512.703.827,86 atau 14,27%, untuk tahun 2015 sebesar Rp 172.896.462.213,79 atau 19,11%, untuk tahun 2016 sebesar Rp 217.391.406.405,63 atau 19,25%, untuk tahun 2017 sebesar Rp 209.063.267.452,75 atau 17,92%. Jumlah selisih anggaran dan realisasi dilihat dari jumlah nominal selisih ini cukup besar, maka dapat dikatakan kinerjanya kurang baik, karena hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran atau masih adanya program/kegiatan yang belum dilaksanakan.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 7. Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Anggaran 2013-2017

Tanggal Anggaran	Realisasi Belanja Thn t-1	Realisasi Belanja Thn t	Kenaikan/ (Penurunan)	%	Kinerja
2012-2013	611.170.952.841,88	655.932.038.459,43	44.761.085.617,55	7,32	Baik
2013-2014	655.932.038.459,43	731.680.260.276,83	75.748.221.817,40	11,55	Baik
2014-2015	778.254.103.607,97	731.680.260.276,83	(46.573.843.331,14)	-5,98	Kurang Baik
2015-2016	731.680.260.276,83	911.768.784.364,92	180.088.524.088,09	24,61	Baik
2016-2017	911.768.784.364,92	957.598.284.549,55	45.829.500.184,63	5,03	Baik

Sumber: Data BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2013-2017, yang diolah 2018

Analisis pertumbuhan yang dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja yang positif meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar -5,98%. Pertumbuhan belanja Kota Probolinggo yang terjadi selama periode Tahun Anggaran 2013-2017 yaitu sebesar 7,32%, 11,55%, -5,98%, 24,61%, 5,03%.

3. Analisis Keserasian Belanja

a. Analisis Belanja Operasi

Tabel 8. Analisis Belanja Operasi Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio	Kinerja
2013	586.914.299.976,69	655.932.038.459,43	89,48%	Kurang Baik
2014	670.299.509.257,25	778.254.103.607,97	86,13%	Kurang Baik
2015	655.725.259.094,14	731.680.260.276,83	89,62%	Kurang Baik
2016	762.295.716.168,07	911.768.784.364,92	83,61%	Kurang Baik
2017	718.357.548.613,74	957.598.284.549,55	75,02%	Kurang Baik

Sumber Data: BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2013-2017, yang diolah 2018

Analisis belanja operasi terhadap total belanja dari tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 yaitu sebesar 89,48%, 86,13%, 89,62%, 83,61%, 75,02. Dari analisis rasio ini terlihat penggunaan belanja operasi cukup besar yang artinya total belanja di dominasi untuk pemenuhan belanja operasi.

b. Analisis Belanja Modal

Tabel 9. Analisis Belanja Modal Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio	Kinerja
2013	68.161.679.882,74	655.932.038.459,43	10,39%	Kurang Baik
2014	106.923.357.838,72	778.254.103.607,97	13,74%	Kurang Baik
2015	74.291.701.182,69	731.680.260.276,83	10,15%	Kurang Baik
2016	147.705.780.025,85	911.768.784.364,92	16,20%	Kurang Baik
2017	239.181.366.935,81	957.598.284.549,55	24,98%	Kurang Baik

Sumber: Data BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2013-2017, yang diolah 2018

Analisis belanja modal terhadap total belanja tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 yaitu sebesar 10,39%, 13,74%, 10,15%, 16,20%, 24,98%. Pemenuhan belanja modal cukup rendah dari total belanja, namun untuk dua tahun terakhir terjadi peningkatan belanja modal.

c. Analisis Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 12. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Rasio Belanja Langsung %	Rasio Belanja Tidak Langsung %	Total %	Kinerja
2013	48,89	51,11	100	Kurang Baik
2014	54,07	45,93	100	Baik
2015	47,43	52,57	100	Kurang Baik
2016	55,68	44,32	100	Baik
2017	64,38	35,62	100	Baik

Sumber: Data BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2013-2017, yang diolah 2018

Hasil perhitungan analisis belanja langsung dan tidak langsung selama tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017 menunjukkan pengalokasian dana selalu mengalami perubahan, akan tetapi untuk dua tahun terakhir pengalokasian dana didominasi untuk belanja langsung yang artinya total belanja lebih besar dialokasikan untuk belanja yang terkait dengan program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah.

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio belanja ini digunakan untuk

mengukur untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Tabel 13. Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	Kriteria
2013	732.492.777.762,65	655.932.038.459,43	89,55%	Cukup Efisien
2014	907.766.807.435,83	778.254.103.607,97	85,73%	Cukup Efisien
2015	904.576.722.490,62	731.680.260.276,83	80,89%	Cukup Efisien
2016	1.129.160.190.770,55	911.768.784.364,92	80,75%	Cukup Efisien
2017	1.166.661.552.002,30	957.598.284.549,55	82,08%	Cukup Efisien

Sumber: Data BPPKAD Kota Probolinggo Tahun 2013-2017, yang diolah 2018

Perhitungan rasio efisiensi belanja dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 yaitu sebesar 89,55%, 85,73%, 80,89%, 80,75%, 82,08%. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan penghematan dari total anggaran yang telah dianggarkan, dari hasil ini Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan SILPA surplus yang dapat digunakan untuk tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Secara umum hasil analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Probolinggo pada Tahun Anggaran 2013-2017 menunjukkan peningkatan kinerja dalam pemenuhan belanja daerah, hal itu dapat terlihat dari hasil analisis tahun 2017 yang menunjukkan persentase selisih anggaran dan realisasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, pertumbuhan belanja yang tidak terlalu tinggi, meningkatkan pembangunan daerah dan melakukan penghematan yang tidak mengurangi proporsi pembelanjaan.

DAFTAR REFERENSI

- Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta Barat: Permata Puri Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cristian, Indra Lontaan. 2016. Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret*. 2016 ISSN 2303-1174. Hal. 898-906. Diakses pada 05 April 2018.
- Daling, Marchelino. 2013. Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2015*. ISSN 2303-1174. Hal. 82-89. Diakses pada 05 April 2018.

- Darmawan, Deni. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Efferin, Sujoko, Stevanus Hadi Darmadji dan Yuliawati Tan. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Friska, Anastasia Palilingan, dkk. 2015. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015*. ISSN 2303-1174. Hal. 17-25. Diakses tanggal 24 April 2018.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Keuangan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, Mohamad. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusutan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sharon, Ariel Sumenge. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013*. ISSN 2303-1174. Hal. 74-81. Diakses tanggal 04 Maret 2018.
- Yunita, Grace Liando. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016*. ISSN 2303-1174. Hal. 1473-1484. Diakses tanggal 24 April 2018.